DAFTAR PUSTAKA

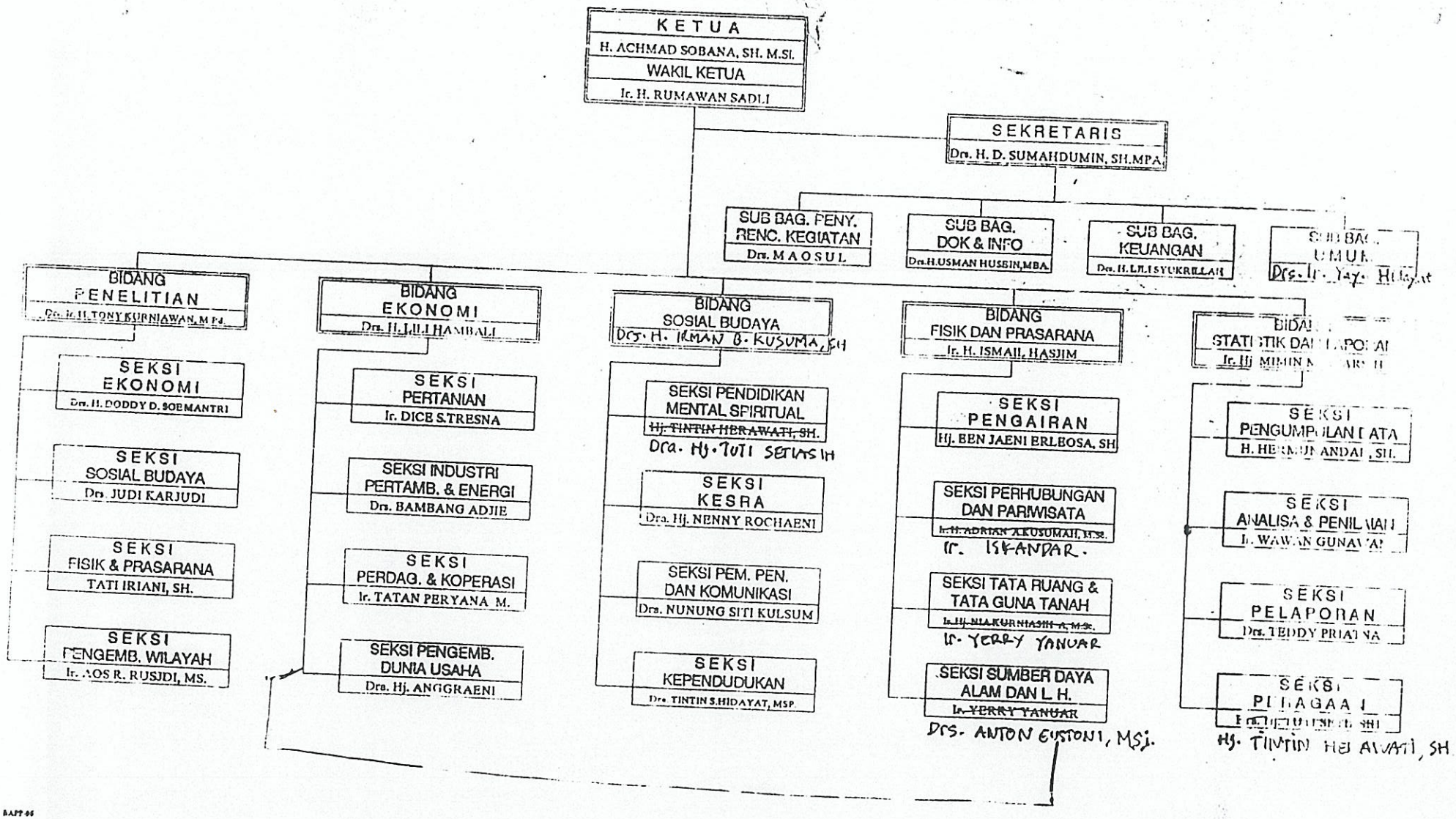
1. Siswanto Bambang, MA. Hubungan Masyarakat, Bumi Aksara, (Tahun 1992 : 35-36)
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Mengenai Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (No:15 Tahun 1974)
3. Efendy Onong Uchjana, MA. Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis, Remadja Karya (Tahun 1986, 52-53)


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 165 Tahun 1980



BAPP 66

Eksistensi, Fungsi dan Prediksi Tentang Parpol di Indonesia Pasca-Pemilu 1999

*(Tulisan ini diangkat secara utuh dari makalah penulis pada Simposium Nasional "Mencari Format Kampanye Pemilu yang humanis dalam Pelaksanaan Pemilu 1999" yang diselenggarakan Forum Dinamika Komunikasi Bandung pada tanggal 29 Maret 1999 di Hotel Horison Bandung. **Dr. Rusadi Kantaprawira** adalah pengajar Fisip, FH dan Pasca Sarjana UNPAD.)*

Oleh : Rusadi Kantaprawira

Eksistensi Parpol

Apabila kita renungkan secara mendalam, dewasa ini sedang terjadi suatu proses **dekonstruksi** terhadap sistem politik yang dibina regim Orde Baru selama 32 tahun. Dekonstruksi ini baru sampai pada penolakan *(rejection)* terhadap apa yang menjadi struktur-struktur penopang dan mekanisme politik Orde Baru yang dibina paling tidak selama seperempat abad, namun kita belum berhasil membangun kembali reruntuhannya secara membaharu sesuai dengan tujuan awal dari reformasi.

Sebagai akibat dari belum menentunya kehidupan politik tersebut, maka syarat keberlangsungan suatu Pemilu yang berjalan dengan demokratis akan merupakan pemutus dari masa transisi yang membingungkan *(break with the past)*. Apabila kita dapat menghasilkan suatu Pemilu yang berkualitas, maka niscaya Indonesia baru yang demokratis dapat mulai diletakan dasar-dasarnya. Wahana untuk mencapai Pemilu tersebut tentunya harus disertai oleh cara-cara dan metode kampanye yang berkesesuaian *(equifinality)*.

Beberapa kekuatan pilar penyangga Orde Baru, setidak-tidaknya telah digoyahkan. Golkar dan ABRI (yang selama lebih dari 30 tahun selalu mendukung Golkar) mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat, karena melahirkan kekuatan monolitik yang berekses ke arah totaliterisme karena terbentuknya mayoritas mutlak yang berlanjut secara terus menerus melalui rekayasa *(prolonged absolute majority)*. Melalui Seminar September 1998 lalu, ABRI telah merumuskan paradigma baru yang intinya memposisikan ABRI dalam kehidupan kenegaraan secara tepat dalam interaksinya dengan berbagai komponen bangsa. Sungguh hal ini merupakan fenomena menarik yang terjadi dalam kehidupan politik Indonesia, apabila dilihat dari :

Kesatu, sampai hari ini kita belum menentukan apalagi menjalankan suatu sistem politik yang baku dalam arti sebagai format dan paradigma yang mapan untuk bisa keluar dari kemelut di berbagai bidang kehidupan. Hal ini ditandai oleh adanya serangkaian tuntutan atau tuntutan yang tak bersambut, dan penolakan akan tuntutan akan perubahan, karena berkehendak untuk mempertahankan *"status quo"*. Hari ini masih terjadi enigma dan stigma (ketidakjelasan) dalam kehidupan politik kita. Perpolitikan kita apabila dianalisis, baru menentukan paradigma yang sifatnya masih berkutat pada penataan aparatur yang sebelumnya mendapatkan berbagai kemudahan dan "privilege" dari sistem Orde Baru. Hal ini disebut sebagai "nomenklatura" dalam istilah keterbukaan/transparansi *(glasnost)*-nya Gorbachev. Artinya, secara analog, paradigma kita yang dibangun itu belumlah menghasilkan restrukturisasi (perestroika) dan demokratisasi

(demokratizatsiia) sebagai realitas (lihat Magstadt and Schotten, 1996: 185-191).

Kedua, kehidupan kepartaian kita dewasa ini mirip situasi pada masa penjajahan Belanda; yaitu kembali atas dasar pola aliran keagamaam, nasionalisme dan bahkan yang berlandaskan sosial-ekonomi (sosialis). Pola keagamaam didasarkan atas berbagai aliran dalam Islam dan juga Kristen Protestan serta Katolik. Seperti diketahui, pada masa penjajahan, "Volksraad" merupakan embrio lembaga legislatif ketika itu. Pengisian keanggotaan "Volksraad" itu dilakukan melalui penunjukan dan persetujuan pengusaha kolonial. Dengan demikian tidak terdapat sambungan kejiwaan antara partai-partai politik yang dibentuk ketika itu dengan "Volksraad".

Hal ini hampir analog dengan tidak bersambungnya partai-partai politik yang dibentuk menjelang, taktala dan setelah reformasi dengan DPR/MPR hasil Pemilu 1997. Demikian pula di dalam DPR/MPR tersebut masih terdapat anggota-anggota yang diangkat. Tiga partai dan ABRI yang berada di DPR merumuskan UU No. 2, 3 dan 4 Tahun 1999 (tentang Parpol, Pemilu dan Susduk MPR, DPR dan DPRD) itu di samping dengan sendirinya harus mempertahankan eksistensinya, namun juga karena tuntutan reformasi, harus memberikan pengakuan kepada "partai-partai sosiologis" yang sesungguhnya secara yuridis-formal bertentangan dengan undang-undang bidang politik sebelumnya (UU No. 15 dan 16 Tahun 1969 dan UU No. 3 Tahun 1975 seperti kemudian beberapa kali diubah dan disesuaikan) dan juga menggoyahkan eksistensi dan monopoli mereka selama lebih kurang 30 tahun lamanya menuju ke arah keseragaman dalam segala hal (Perancis: *sens unique*).

Hal lainnya juga menunjukan betapa besarnya kekuatan tekanan reformasi itu, sehingga sedemikian rupa hukum positif dapat disisihkan. Hukum positif dalam bidang politik tersebut tersisihkan oleh tuntutan sosiologis, kendati sebenarnya, apabila dilakukan "voting" di dalam DPR, niscaya tidak akan pernah lahir ketiga UU bidang politik yang baru tadi.

Tentu saja hal ini, di satu pihak membuka kemungkinan pengekspresian nilai-nilai baru, namun juga melahirkan ikatan-ikatan parokial-primer. Di lain pihak juga dapat dinyatakan sebagai langkah mundur; karena dalam alam modern yang memerlukan sinergi itu justru lahir perpolitikan rasial, kesukuan dan keagamaan *(racial, tribal, ethnic and religious-based politics)* yang bersifat cenderung disintegratif (lihat juga Huntington, 1991: 37-38). Sedangkan di pihak lain Naisbitt menyatakan bahwa *"the bigger the system, the more efficient must be the parts"* (1995: 14) dan *"hot spots"* perpolitikan-sempit itu berada dalam paradoks *"the more universal we became, the more tribal we act"* (1995: 24-26), sehingga kita menjadi terjauh dari cita-cita yang mulia dalam mendirikan negara.

Ketiga, "sejarah berulang kembali" ke masa sistem multipartai tahun 1955-1959 yang ditandai dengan tidak adanya satu kekuatan politik yang mampu menguasai mayoritas mutlak tanpa kerja sama atau tanpa mengadakan koalisi dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian betapa rapuhnya pula mayoritas mutlak yang terbentuk atas dasar janji-janji kerja sama tersebut. Kerja sama yang didasarkan pada landasan kooperatif yang goyah akan melahirkan mayoritas mutlak yang relatif tidak kokoh yang kemudian akan tercermin ke dalam suasana pemerintahannya dalam wujud labilitas (instabilitas) politik (Huntington dalam Welch, Jr., 1969, 243: "..."the multiparty system makes the system extremely fragile. The step form many parties to no parties and form no parties to manyparties is an easy one. In their institutional weakness, the no-party system and the multyparty system closely resemble each other"). Dalam suasana sistem multipartai tersebut akan muncul perilaku; teknik kalong"

(bat techique) dengan menyatakan bahwa "saya ini kalong, lihat sayapku; (dan selang beberapa lama kemudian menyatakan bahwa) saya ini tikus lihat saja moncongku" ("I am a bird look at my wings; I am a mouse, long live the rats") (Duverger, 1961: 333).

Keempat, menurut hukum positif ketika itu, yakni UU tentang Partai Politik dan Golkar (UU 3-1975 jo. UU 3-1985), yang diakui secara resmi hanyalah tiga "parpol": PPP, Golkar dan PDI. Di samping itu terdapat satu kekuatan sosial politik, melalui Dwifungsinya yang dikukuhkan maupun daerah melalui pengangkatan; yaitu ABRI. Kendati demikian, pada awal reformasi secara sosiologis telah dibnetuk beberapa partai politik besar yang diikuti oleh menjamurnya pembentukan partai-partai politik kecil (menurut catatan berjumlah 141 buah). Kemudian pada tanggal 7 Maret lampau Golkar mendeklarasikan diri sebagai suatu partai politik. Sesuatu yang sejak kelahirannya 20 Oktober 1964 paling ditolak untuk disebut sebagai partai politik. Partai Golkar tentunya sukar untuk memutuskan hubungannya dengan masa lampau secara tegas yang ditandai tidak berubahnya tanda gambar dan juga personalia para fungsionarisnya. Golkar yang terpaksa harus mengubah nama menjadi Partai Golkar itu dengan sendirinya harus mempunyai paradigma-baru agar tetap eksis. Sesungguhnya, pengungkapan paradigma baru saja belumlah cukup karena harus teruji di dalam wujud perbuatan; yakni harus bertanding dalam pemilu dengan tekad kejujuran terbebas dari pengerahan birokrasi dan praktek "money politics".

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kampanye yang lebih humanis perlu dipikirkan untuk pertama-tama menghilangkan imej-buruk terlebih dahulu, Presiden/Wakil Presiden dan Menteri-menteri, serta pejabat-pejabat pemerintahan (sipil-militer) sampai ke tingkat desa semasa Orde Baru itu tidak lepas dari praktek penyalahgunaan/pencampuradukan wewenang resmi dan non resmi sebagai fungsional Golkar.

Eksistensi parpol menjelang Pemilu 1999 adalah eksistensi sementara, yakni hanya merupakan keadaan peralihan dari situasi sistem satu-partai tak kentara (di mana Golkar secara terus menerus menguasai mayoritas mutlak dari sejak 1971 s.d 1997) yang diperkuat oleh utusan-utusan daerah dan kemudian secara ekstra sangat diperkuat lagi oleh perwakilan dari Golkar-ABRI dalam ikatan jalur "ABG". Ketika itu PPP dan PDI hanyalah merupakan "pajangan" agar sistem politik kita seolah-olah terlihat demokratis. Dengan adanya formalitas jumlah partai yang lebih dari satu, ke arah sistem multi-partai yang tak terbatas (141 buah), maka lahirlah lagi kehidupan sistem multipartai (94 buah parpol yang lulus dari saringan Depkeh).

Melalui saringan ketentuan yuridis-formal berupa kewajiban pendaftaran di Departemen Kehakiman tersebut nampak adanya parpol yang benar-benar serius atau hanya merupakan ungkapan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Seleksi yang lebih bersifat kuantitaitif (belum kualitatif) adalah penyaringan yang dilakukan Tim-11. Hanya parpol yang paling sedikit memenuhi ketentuan dapat membentuk DPD di sepertiga atau 9 buah propinsi dapat turut serta dalam Pemilu. Di samping itu di setiap DPD tersebut pun dipersyaratkan, setidak-tidaknya harus dibentuk DPC di setengah dari jumlah Kabupaten/Kotamadya yang ada di propinsi yang bersangkutan. Karena itu yang diberi izin mengikuti Pemilu 1999 ini hanyalah 48 parpol saja.

Eksistensi multipartai ini diduga akan melahirkan sistem multipartai. Seperti diketahui ciri dari sistem multipartai itu adalah apabila mayoritas mutlak untuk mengambil keputusan di dalam lembaga perwakilan rakyatnya selalu dibentuk melalui kerja sama dan koalisi dari dua kekuatan atau lebih. Apabila hal ini dihubungkan

IGI INDONESIAN GERMANY INSTITUTE | LPKIG
LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER INDONESIA JERMAN
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR NO. 102 TELP. (022) 2506637, (022) 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR NO. 114-116 TELP. (022) 2504119, (022) 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR NO. 82 TELP. (022) 2503430, FAX. (022) 2506634 BANDUNG 40132

PENGAJUAN TUGAS AKHIR

(No. ..... /XI/IGI-LPKIG/1998)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOKOM KOMALASARI

Kelas/NIM : PR 19809

Jurusan : Public Relations

Alamat/Telepon : Jl. Moch Iwan no 2 Regol / Bandhan
Telp. 022 - 5200752

Mengajukan Tugas Akhir dengan :

Judul : Peranan Humas Dalam Menginformasikan Produk Pembangunan di BAPPEDA TK. I JABAR.

Ringkasan : Fungsi dan Satu bagian dokumen dan Informasi di BAPPEDA TK I JABAR dalam menginformasikan produk²/ Pembangunan dan usaha²/ untuk menjalin hubungan baik diantara pihak intern dan ekstern.

Pembimbing : Drs. Pandhu Edi Kuncoro

Bandung, 31 - 8 - 1998

Pembimbing

Drs. Pandhu Edi

Mahasiswa Ybs,

KOKOM KOMALASARI

Ketua Jurusan

Drs Engkus Kuswarno, MSc

IGI INDONESIAN GERMANY INSTITUTE | LPKIG
LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER INDONESIA JERMAN
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR NO. 102 TELP. (022) 2506637, (022) 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR NO. 114-116 TELP. (022) 2504119, (022) 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR NO. 82 TELP. (022) 2503430, FAX. (022) 2506634 BANDUNG 40132

PENGAJUAN TUGAS AKHIR

(No. ..... /XI/IGI-LPKIG/1998)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMALIA GANTINI

Kelas/NIM : PR 198002

Jurusan : Public Relations

Alamat/Telepon : Sukamiskin Raya no 109 Bandung, Telp: 721854

Mengajukan Tugas Akhir dengan :

Judul : Peranan Humas Dalam Menginformasikan Produk Pembangunan di BAPPEDA TK. I JABAR

Ringkasan : Fungsi dari Sub bagian dokumen dan informasi di BAPPEDA TK. I JABAR dalam menginformasikan produk 2/ pembangunan dan usaha 2/ untuk menjalin hubungan baik diantara pihak intern dan ekstern.

Pembimbing : Drs. Pandhu Edi Kuncoro

Bandung, 31 - 8 - 1998

Pembimbing

a.n.

Drs. Pandhu Edi

Mahasiswa Ybs,

AMALIA G.

Ketua Jurusan

Drs. Engkus Kuswarno, Msc

IGI INDONESIAN GERMANY INSTITUTE LPKIG
LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER INDONESIA JERMAN
KAMPUS I : Jl. DIPATI UKUR NO. 102 TELP. (022) 2506637, (022) 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR NO. 114-116 TELP. (022) 2504119, (022) 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR NO. 82 TELP. (022) 2503430, FAX. (022) 2506634 BANDUNG 40132

PENILAIAN KERJA PRAKTEK
INDONESIAN GERMANY INSTITUTE (IGI-LPKIG)

Nama Mahasiswa/i : KOKOM KOMALASARI
NIM : 195019
Jurusan : Public Relations
Nama Perusahaan : BAPPEDA TK. I JAWA BARAT
Alamat Perusahaan & Telepon : Jl. Ir. H. Juanda 251
Waktu Kerja Praktek : 12 Juli – 24 juli 1999
Nama Pejabat Penilai : Drs. H. Lili Syukrilah
Jabatan : Kasubbag Dok & Info

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1.	Disiplin Dalam Kerja		
2.	Kemampuan Menyelesaikan Tugas		
3.	Prestasi Kerja		
4.	Inisiatif		
5.	Kepribadian		

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKTEK

Peranan Humas Dalam Menginformasikan Produk Perencanaan Pembangunan di BAPPEDA TK I JAWA BARAT

Komentar Pejabat Penilai
Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/i IGI-LPKIG

.....

.....

NILAI	*INDEKS*	*KETERANGAN*
80 ≤ NA ≤ 100	A	Sangat Baik
70 ≤ NA ≤ 79	B	Baik
55 ≤ NA ≤ 69	C	Cukup
41 ≤ NA ≤ 54	D	Kurang
0 ≤ NA ≤ 40	E	Buruk

Bandung, 31 – 8 – 1999

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Drs. Djoko Djauhari

Pejabat Penilai

Drs. H. Lili Syukrilah
(Nama, Tanda Tangan & Cap)

IGI INDONESIAN GERMANY INSTITUTE LPKIG
LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER INDONESIA JERMAN
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR NO. 102 TELP. (022) 2506537, (022) 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR NO. 114-116 TELP. (022) 2504119, (022) 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR NO. 82 TELP. (022) 2503430, FAX. (022) 2506634 BANDUNG 40132

PENILAIAN KERJA PRAKTEK
INDONESIAN GERMANY INSTITUTE (IGI-LPKIG)

Nama Mahasiswa/i : AMALIA GANTINI
NIM : PR 198002
Jurusan : Public Relations
Nama Perusahaan : BAPPEDA Tk. I JAWA BARAT
Alamat Perusahaan & Telepon : Jl. Ir. H. Juanda 287
Waktu Kerja Praktek : 12 Juli – 29 Juli 1999
Nama Pejabat Penilai : Drs. H. Lili Syukrilah
Jabatan : Ka Subbag Dok & Info

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1.	Disiplin Dalam Kerja		
2.	Kemampuan Menyelesaikan Tugas		
3.	Prestasi Kerja		
4.	Inisiatif		
5.	Kepribadian		

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKTEK

Peranan Humas Dalam Menginformasikan Produk Perencanaan pembangunan di BAPPEDA Tk. I JAWA BARAT

Komentar Pejabat Penilai
Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/i IGI-LPKIG

.....

.....

NILAI	*INDEKS*	*KETERANGAN*
80 ≤ NA ≤ 100	A	Sangat Baik
70 ≤ NA ≤ 79	B	Baik
55 ≤ NA ≤ 69	C	Cukup
41 ≤ NA ≤ 54	D	Kurang
0 ≤ NA ≤ 40	E	Buruk

Bandung, 31 - 8 - 1999

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Drs. Djoko Djauhari

Pejabat Penilai

Drs. H. Lili Syukrilah
(Nama, Tanda Tangan & Cap)


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Amalia Gantini
Jenis Kelamin	:	Wanita
Alamat	:	JL. Sukamiskin Raya No. 109 Bandung
Tempat / Tanggal Lahir	:	Bandung / 20 November 1979
Agama	:	Islam
Golongan darah	:	O
Nomor Telephone Rumah	:	022 – 7218554

Nama Orang Tua

Ayah	:	U. Maryono
Ibu	:	H. E. Kartini

Pendidikan

- TK Badak Putih Bandung
- SDN Sukakarya 01 Bandung.
- SMPN 4 Bandung.
- SMUN Pasundan 1 Bandung
- D1 IGI – LPKIG jurusan Public Relations

Demikian data ini saya buat dengan sebenar-benarnya, harap dipergunakan seperlunya.

Bandung, Agustus 1999

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Kokom Komalasari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	JL. Jiwantaka I No. 12 Rt : 02 Rw : 04 Lingkungan Baru Serang – Banten
Tempat / Tanggal Lahir	:	Pandeglang / 17 Desember 1980
Agama	:	Islam
Golongan Darah	:	A
Nomor Telephone Rumah	:	-

Nama Orang Tua

Ayah	:	Sanam
Ibu	:	Hj. Kaminah

Pendidikan

SD Kampung Baru Serang

SMPN 3 Serang

SMU " YP " 17 Serang

Demikian Data ini saya buat dengan sebenar-benarnya, harap dipergunakan seperlunya.

Bandung, Agustus 1999

Penulis